

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Ditjen PKRL
Triwulan I Tahun 2025

Layanan informasi publik diuraikan mengenai jumlah informasi publik, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu, jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya. Hasil layanan informasi publik di lingkungan Ditjen PKRL sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
1	Triwulan I	50	2 Januari 2025	Data luas lahan yang telah direklamasi wilayah pesisir hingga saat ini di Indonesia, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.	8	36	14	Tidak melengkapi persyaratan
			7 Januari 2025	1. Bagaimana evaluasi dampak subsidi terhadap sektor perikanan dan lingkungan laut dalam 5 tahun terakhir? 2. Data eksploitasi ikan, termasuk overfishing di berbagai wilayah perairan Indonesia 5 tahun terakhir. Tolong berikan pandangan anda terkait hal tersebut. 3. Data tentang spesies ikan yang terancam akibat praktik penangkapan ikan berlebih (overfishing) dan IUU Fishing di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana pandangan anda terkait	8			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
				manajemen pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini? 4. Laporan tentang kondisi lingkungan laut terutama terumbu karang, mangrove, dan padang lamun di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Apakah telah diupayakan konservasi terhadap lingkungan laut yang terdampak praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggungjawab? Bagaimana pendapat anda terkait hal tersebut? Apa indikator kesehatan lingkungan laut dan dampaknya terhadap stok ikan dan lingkungan laut di Indonesia dalam 5 tahun terakhir? Apa dampak nyata kerusakan lingkungan laut terhadap populasi ikan di perairan Indonesia, serta bagaimana imbasnya terhadap ekonomi lokal dan nelayan kecil?				
2			8 Januari 2025	Regulasi Aktivitas Wisata Dolphin Watching Lovina dan Peta Jalur Migrasi Lumba-lumba	4			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
3			17 Januari 2025	Delineasi KKPRL Penataan Kawasan Waterfront Marina, no.KKPRL B.645/MEN-KP/XII/2021	1			
4			21 Januari 2025	Hiu dan rays semua species yang landing di Muncar 10 tahun terakhir dengan format: date; month; year; ;tanggal/bulan/tahun ; Ukuran kapal (besar/kecil); boat_length; family; genus; species; FL; Total Length; sex; threat_status; CITES; harga di pasar;	11			
5			21 Januari 2025	1. Apa faktor-faktor utama yang mendorong pemerintah Indonesia memutuskan membuka kembali ekspor sedimentasi laut pada tahun 2023? 2. Bagaimana proses pengambilan keputusan kebijakan ini di Tingkat pemerintah? 3. Kementerian mana yang lebih dahulu mengusulkan atas kebijakan ekspor sedimentasi laut ini yang turun melalui PP No 26 Tahun 2023?	17			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
6			22 Januari 2025	Pembuatan laporan kerja praktik jurusan Ilmu Kelautan Universitas Tanjungpura	4			Tidak melengkapi persyaratan
7			22 Januari 2025	Permohonan magang	4			Tidak melengkapi persyaratan
8			24 Januari 2025	Izin terkait peletakan rumpon nelayan.	1			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
9			24 Januari 2025	Penyusunan Laporan Kerja Praktek	4			Tidak melengkapi persyaratan
10			24 Januari 2025	Penyusunan Laporan Kerja Praktek	4			Tidak melengkapi persyaratan
11		11	24 Januari 2025	Penyusunan Laporan Kerja Praktek	4			Tidak melengkapi persyaratan
12			24 Januari 2025	Penyusunan Laporan Kerja Praktek	4			Tidak melengkapi persyaratan
13			24 Januari 2025	Penyusunan Laporan Kerja Praktek	4			Tidak melengkapi persyaratan

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
14			24 Januari 2025	Penyusunan Laporan Kerja Praktek	4			Tidak melengkapi persyaratan
15			28 Januari 2024	data terkait penelitian program Bulan Cinta Laut	1			Tidak melengkapi persyaratan
16			30 Januari 2024	Penyusunan Laporan Kerja Praktek	4			
17			5 Februari 2025	Praktek Kerja Lapangan	6			
18			6 Februari 2025	Data Pendaratan Hiu di Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT	10			
19			6 Februari 2025	1. Statistik atau Laporan Produksi Rumput Laut di kawasan konservasi yang dikelola oleh BKKPN Kupang 2. Data Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir yang terlibat dalam budidaya rumput laut. 3. Informasi Infrastruktur yang mendukung budidaya rumput laut di kawasan konservasi (tempat	1			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
				pengeringan, penyimpanan 4. Informasi mengenai keanekaragaman hayati di sekitar kawasan budidaya rumput laut seperti: (terumbu karang, mangrove, lamun). 5. Dokumentasi tentang teknik dan teknologi yang digunakan dalam budidaya rumput laut. 6. Laporan Pengelolaan ESG yang diterapkan dalam konservasi laut dan budidaya rumput laut. 7. Data Dampak lingkungan dari budidaya rumput laut, baik positif maupun negatif 8. Data laporan mengenai pemantauan kualitas air di kawasan budidaya. 9. Data terkait tantangan dalam proses budidaya dan keberlanjutan produksi. 10. Studi Kasus Keberhasilan Program ESG terkait dengan budidaya rumput laut. 11. Dokumen Kebijakan dan Regulasi terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan dan budidaya rumput laut				
20			12 Februari 2025	Magang mahasiswa UGM	2			
21			13 Februari 2025	Peta wilayah pesisir se-Indonesia dan Peta pulau-pulau kecil se-Indonesia	4			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
22		9	13 Februari 2025	Wawancara terkait kondisi, dampak serta penanggulan 'life below water' untuk pemenuhan pengetahuan masyarakat.	13			
23			14 Februari 2025	Informasi terkait kesempatan magang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut selama 3 bulan terhitung dari Maret - Juni 2025	1			
24			14 Februari 2025	a. Peta dari kawasan konservasi pulau-pulau kecil yang dilindungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): 1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Nias Selatan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara 2. Kawasan Konservasi di Perairan Seram Utara dan Seram Utara Barat di Provinsi Maluku 3. KKPD Pulau Kur, Tayando, Tam 4. KK-PKK-01 Kuala Lupak b. Apakah tersedia peta kawasan konservasi pulau-pulau kecil yang dilindungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lainnya selain yang telah disebutkan pada a1-a4? c. Apakah ada peta manual (dalam resolusi tinggi) yang dapat diakses? karena website berikut sedang tidak dapat diakses https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/status-pengelolaan-kawasan-konservasi/tipe/KKP	1			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
				D Data dan informasi tersebut diperlukan dalam merampungkan riset kami, terkait perlindungan hutan pada pulau-pulau kecil yang dilindungi oleh KKP.				
25			14 Februari 2024	informasi terkait KKD Kepulauan Raja Ampat dengan status Penetapan MKP (apa yang dimaksud dengan status ini?) dengan luas 1.348.459,47 Ha. Sebagai tambahan, berdasarkan informasi sebelumnya bahwa KKD Kepulauan Raja Ampat dikelola oleh Pemda. Pemda dimaksud ini Dinas apa? Apakah dapat diberikan informasi lengkap terkait ke mana data ini dapat dimintakan?	1			
26			19 Februari 2025	Keperluan pengembangan usaha	13			
27			20 Februari 2025	informasi jumlah kapal di pelabuhan tpi prigi	9			
28			20 Februari 2025	Informasi untuk desk study terkait kondisi terumbu karang di Provinsi NTB	4			Tidak melengkapi persyaratan
29			20 Februari 2025	Laporan Kerja Praktik	5			
30			25 Februari 2025	Data peneluran dan penetasan telur penyu di kawasan konservasi nasional pulau Pieh dan laut sekitarnya	6			
31			26 Februari 2025	Data kebutuhan dan produksi garam nasional	4			Tidak melengkapi persyaratan
32		5	26 Februari 2025	neraca garam nasional tahun 2020 - 2024	5			Tidak melengkapi persyaratan
33			27 Februari 2025	Informasi terkait PKKPRL (PERMOHONAN KE DJPKPRL - nusantara	10			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
				sepakat.pdf - Google Drive				
34			3 Maret 2025	Laporan Kerja Praktek	7			
35			3 Maret 2025	Laporan Kerja Praktek	8			
36			3 Maret 2025	Laporan Kerja Praktek	7			
37			3 Maret 2025	Laporan Kerja Praktek	7			
38			6 Maret 2025	Dokumen perizinan yang disyaratkan seperti Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dan Sertifikat untuk Spesies Dilindungi/Appendiks 2 (spesies Carcharhinus falcimormis) serta Rekomendasi untuk look alike species (spesies Paragaleus randalli), Hasil rekapitulasi Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap golongan, dokumentasi pada kegiatan lalu lintas perdagangan jenis ikan hiu tersebut di dalam dan luar negeri dan jumlah tiap jenis produk pada bagian hiu secara utuh, gelondongan, sirip, daging dan kulit pada wilayah Jakarta pada loka pspl serang satker Jakarta pada tanggal 1-28 Februari 2025.	5			
39			7 Maret 2025	1. Profil dan Masterplan Kawasan Konservasi Perairan 2. Rencana Induk Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur 3. Data Kelayakan Finansial	4			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
				per Infrastruktur 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir 5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil				
40			7 Maret 2025	Laporan Kerja Praktek	7			
41			10 maret 2025	• Jumlah hiu (sirip, oil dan produk lainnya) di export selama 5 tahun terakhir dari seluruh wilayah Indonesia • Jumlah hiu (sirip, oil dan produk lainnya) di export selama 5 tahun terakhir dari wilayah jawa timur • Jumlah exportir hiu di jawa timur • Volume hiu (sirip, oil dan produk lainnya) dan jenis-jenisnya selama 5 tahun terakhir • Kuota export hiu untuk masing-masing exportir di Daerah Jawa Timur • wilayah tujuan export selama 5 tahun terakhir (2019-2024)	10			
42			11 Maret 2025	Jenis hewan laut Indonesia yang penting diketahui oleh anak-anak sejak dini, jenis hewan laut yang kini dilindungi oleh pemerintah di Indonesia, dan beberapa jenis hewan laut endemik asli Indonesia yang penting diketahui oleh anak-anak	5			
43			12 Maret 2025	data sekunder data hasil tangkapan ikan terubuk (Tenulosa macrura) yang berada di perairan selat Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	10			
44			13 Maret 2025	Data Series lamun dari tahun 2014-2024	3			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
45			14 Maret 2025	Laporan Kerja Praktek	3			
46			14 Maret 2025	Data yang dibutuhkan dengan rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kawasan Konservasi Kapoposang, antara lain: 1. Data kondisi terumbu karang, 2. Data eksisting rehabilitasi karang, 3. Data capaian adopsi karang, 4. Data sosial-ekonomi Pulau Kapoposang, dan 5. Peta kawasan konservasi Kapoposang dalam bentuk Shp	2			
47			17 Maret 2025	Zonasi dalam pengurusan izin ruang laut	5			Tidak melengkapi persyaratan
			19 Maret 2025	penjelasan lebih lanjut mengenai apakah terdapat penilaian atau prosedur tambahan yang perlu dilakukan oleh Pemohon setelah melakukan pembayaran PNBPN, atau apakah Pemohon hanya menunggu terbitnya PKPRL setelah pembayaran PNBPN dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Lampiran urutan Nomor 5, Komponen Jangka Waktu Uraian 2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 49 Tahun 2024. dan Pembayaran tersebut telah dilakukan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan telah terkonfirmasi melalui Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara	1			

No.	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
				Bukan Pajak (PNBP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)				
48			20 Maret 2025	Data SHP Gili Matra Marine Protected Area	1			
49			20 Maret 2025	Peta/Zona Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat - Lokasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat	1			

1. Total permohonan informasi publik sebanyak 50 informasi.
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu paling cepat 1 hari dan paling lama 17 hari.
3. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan sebanyak 36 informasi.
4. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 14 informasi dengan alasan tidak melengkapi persyaratan yaitu identitas KTP atau Surat Pengantar dari kampus.
5. Informasi yang kurang tepat ditujukan kepada Ditjen PKRL yakni informasi jumlah kapal di TPI Prigi, peta terkini wilayah pesisir se-Indonesia, dan peta terkini pulau-pulau kecil se-Indonesia.